

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PERHUBUNGAN



2018

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2018.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan pertanggungjawaban publik yang berisi tentang pengukuran tingkat keberhasilan atas kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang penulisannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2018. Kami sadar bahwa laporan ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini ke depannya.

Sumenep, Januari 2019

**KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630523 199003 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep	2
1.3 Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
1.4 Visi	4
1.5 Misi	4
1.6 Tujuan	4
1.7 Sasaran	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	8
3.2 Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP	19
DAFTAR LAMPIRAN	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Mengawali pelaksanaan Otonomi Daerah yang pemberlakuannya mulai efektif 1 Januari 2001, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh aparat pemerintah yang amanah dan profesional.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Terselenggaranya kewenangan dan fungsi Dinas Perhubungan merupakan salah satu faktor pendukung Pembangunan Daerah melalui ketersediaannya kelangsungan pelayanan angkutan yang handal, lancar, murah dan teratur dapat menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien sehingga memberikan peluang bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dalam perkembangannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep Nomo 16 Tahun 2008 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah" secara terus menerus telah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama dalam rangka terciptanya "Good Governance" melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/

badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Atas dasar tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus memahami lingkup kerja dan kinerjanya karena kinerja yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan kinerja.

1.2 Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah” bahwa Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perhubungan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta perumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang perhubungan;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang prasarana;
- e. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang pengembangan dan keselamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Visi

Guna mewujudkan eksistensi Dinas Perhubungan dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Visi Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

***Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis,
Nasionalis. Transparan. Adil dan Profesional***

1.5 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep akan melaksanakan Misi II dari beberapa misi yang telah ditetapkan. Adapun Misi II yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep adalah :

Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan;

1.6 Tujuan

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih yang dituangkan dalam RPJMD, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu "Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan".

1.7 Sasaran

Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep mengacu pada RPJMD, yaitu "Meningkatnya kualitas infrastruktur". Hal ini sesuai dengan Misi II Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Selain fungsi utama, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep juga mempunyai fungsi finansial sebagai dinas penghasil dalam rangka peningkatan PAD sektor perhubungan, antara lain :

- Retribusi pelayanan parkir
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi terminal
- Retribusi pelayanan kepelabuhan
- Retribusi sewa toko / kantin / kios
- Retribusi izin trayek



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2018 yang didasarkan pada tugas dan fungsi, program kerja, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep serta ditambah dengan adanya Perubahan Anggaran Kerja (PAK) dituangkan dalam perjanjian kinerja yang merupakan suatu pernyataan / perjanjian kinerja antara bawahan terhadap atasan. Dalam hal ini, rencana kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep terhadap Bapak Bupati Sumenep, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tertumbuhnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyelenggaraan Surat Menyurat	4,699,000
					2. Penyelenggaraan Komunikasi, Simulasi, Daya Air dan	20,260,029,000	
					3. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perizinan Kantor Dinas / Operasional	14,000,000	
					4. Penyelenggaraan Kesehatan Kantor	286,725,000	
					5. Penyelenggaraan Perbaikan Peralatan Kerja	63,000,000	
					6. Penyelenggaraan Alat Tulis Kantor	36,900,000	
					7. Penyelenggaraan Barang Cetak dan Pengangkutan	863,605,000	
					8. Penyelenggaraan Komunikasi Listrik / Pemasangan	13,750,000	
					9. Penyelenggaraan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan Kantor	24,000,000	
					10. Penyelenggaraan Makanan dan Minuman	45,000,000	
					11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	150,000,000	
					12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam	35,000,000	
					2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Komputer	16,050,000
					2. Pemeliharaan Rutil / Beata Gedung Kantor	889,450,000	
					3. Pemeliharaan Rutil / Beata Kantor Dinas /	130,000,000	
					4. Pemeliharaan Rutil/Beata Perengkapan Gedung	22,977,000	
					5. Pemeliharaan Rutil / Beata Meubeler	12,000,000	
					6. Pemeliharaan Rutil / Beata Komputer	45,427,000	
					7. Pemeliharaan Rutil / Beata Alat-Alat Listrik dan	12,000,000	
					8. Pemeliharaan Rutil / Beata Terasan, Pagar, dan	817,364,000	
					9. Sewa Tanah / Gedung	14,000,000	
					3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	25,254,000
					4. Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penguasaan Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran	25,000,000
					2. Penguasaan Laporan Keuangan Semesteran	62,000,000	
					3. Penguasaan Pelaporan Kinerja	10,500,000	
					4. Penguasaan RKA dan DPA	27,000,000	
					5. Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar	1. Peringatan Hari Peringatan Nasional	36,900,000
6. Program Peningkatan Intelektual Peningkatan	1. Penyelenggaraan Pameran Peningkatan	25,000,000					
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1. Persentase lokasi bus yang layak	%	83,75	7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1. Penyelenggaraan Disiplin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jalan Raya	65,000,000
					2. Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Aspek	36,000,000	
					3. Operasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan	176,000,000	
					4. Pendidikan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Perintis	65,000,000	
					8. Program Peningkatan Manajemen dan Kelengkapan Lintas Lintas	1. Pendidikan Pelajar Pelajar Terdiri Lintas Lintas	36,000,000
					2. Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan	256,000,000	
					3. Operasi dan Pelengkapan Lintas Lintas Dinas	62,000,000	
					4. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	50,000,000	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROG RAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1. Persentase kesediaan angkutan umum yang layak	%	83,75	9. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Kelembagaan Bersekolah	1. Pengadaan Alat Peningkatan Kelembagaan Bersekolah 2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Peningkatan Kelembagaan Bersekolah	95,000,000 64,873,375
		2. Persentase larian kecepatan jalan lintas	%	8.0764	10. Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perumahan 11. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perumahan 12. Program Operasional Prasarana Perumahan 13. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 14. Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi	1. Pemeliharaan Pemukiman Prasarana dan Fasilitas Perumahan 2. Koordinasi di antara Pemukiman Prasarana dan Fasilitas Perumahan 3. Peningkatan Pemeliharaan Terminal Angkutan 4. Pemukiman Perbaikan Terminal/ Stasiun 5. Pemukiman Fasilitas Perbaikan/ Rekonstruksi 6. Rehabilitasi Perbaikan/ Terminal/ Stasiun 1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rekonstruksi Perbaikan 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perumahan 1. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan di Lingkungan Perbaikan Perbaikan 2. Pengadaan Sarana Perbaikan Partisipasi 3. Sosialisasi Partisipasi Berbagi 4. Pemukiman Juru Partisipasi 5. Operasional/ Pelaporan Partisipasi 6. Pengembangan Monitoring Partisipasi Topik Jalan Umum 1. Pemeliharaan Traffic Light 2. Pengadaan Alat/ Sarana Keselamatan Transportasi 1. Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan 2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pemukiman Jalan Umum 3. Pengadaan Kapal Motor Pemukiman 4. Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Tirta Masyarakat (WWTM) 5. Penyelenggaraan Deteksi Lingkungan Transportasi	100,000,000 30,527,550 200,000,000 500,000,000 66,575,998,400 1,000,000,000 400,000,000 10,000,000 50,000,000 237,700,000 25,000,000 74,337,525 705,200,000 50,000,000 105,567,470 50,000,000 11,707,375,000 653,831,000 25,810,672,500 40,000,000 510,240,000
TOTAL							134,486,929,957



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Pencapaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 85	Baik
2.	Nilai 70 < 84	Sedang
3.	Nilai 55 < 69	Kurang
4.	Nilai < 54	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak *performance* masing-masing bidang pada Dinas Perhubungan yang merupakan *entry point* untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

3.1. Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep melaksanakan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Rincian capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1 Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0764	0,0921	82,92
	1.2 Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	83,75	96,06	117,97

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Th. 2016, Th. 2017, dan Th. 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1 Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0764	0,0784	0,1051	0,0921
	1.2 Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	83,75	88,86	88,29	96,06

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Th. 2020 (%)	Realisasi Th. 2018 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1. Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0744	0,0921	0,808
	1.2. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	86,15	96,06	1,115

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Tahun 2018

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencapaian indikator kinerja sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2018, kami uraikan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Persentase korban kecelakaan lalu lintas merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi terhadap jumlah

kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2018 adalah 181 kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat adalah 196.456 unit sehingga didapat realisasi sebesar 0,0921%. Sedangkan target pada tahun 2018 sebesar 0,0764% sehingga tingkat capaiannya sebesar 82,92%.

Persentase korban kecelakaan lalu lintas dapat diturunkan dari tahun 2017 namun masih belum dapat diturunkan dari tahun 2016. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 0,1051% dan tahun 2016 sebesar 0,0784%. Di samping itu, persentase korban kecelakaan lalu lintas masih mencapai 0,808% dari target akhir periode Renstra, dimana target akhir periode Renstra (Tahun 2020) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep sebesar 0,0744%.

Alternatif solusi untuk menurunkan tingkat kecelakaan perlu adanya kegiatan kampanye tertib lalu lintas bagi masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas serta perbaikan fasilitas keselamatan (rambu, apil, marka, dll).

2. Indikator Persentase Kecukupan Angkutan Umum yang Layak

Persentase kecukupan angkutan umum yang layak merupakan perbandingan antara jumlah angkutan umum yang lulus uji kelayakan terhadap jumlah angkutan umum yang wajib uji kelayakan. Dimana jumlah angkutan umum yang lulus uji kelayakan adalah 6682 unit dan jumlah angkutan umum wajib uji kelayakan adalah 6956 unit sehingga didapat realisasi 96,06%. Sedangkan target pada tahun 2018 sebesar 83,75% sehingga tingkat capaiannya sebesar 114,70%.

Indikator persentase kecukupan angkutan umum yang layak sudah dapat ditingkatkan dari tahun 2016 dan 2017. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 88,29% dan tahun 2016 sebesar 88,86%. Di samping itu, persentase kecukupan angkutan umum yang layak sudah mencapai 1,115% dari target akhir periode Renstra, dimana target akhir periode Renstra (tahun 2020) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep sebesar 86,15%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah tinggi akan pentingnya uji kelayakan terhadap keselamatan berkendara.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	21,734,529,800	16.17%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	850,548,350	0.63%
		2. Persentase korban kecelakaan lalu lintas	111,821,891,799	83.20%
TOTAL			134,406,969,949	100%

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	PENYERAPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Peningkatan pelayanan angkutan dan terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelayanan angkutan	65.00%	65.00%	100.00%	Rp 425,637,550	Rp 349,627,100	82.14%	82.14%
	1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								
	2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor								
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi	Persentase kecukupan prasarana dan fasilitas perhubungan	70.00%	81.50%	116.43%	Rp 72,943,205,829	Rp 29,498,244,337	40.44%	34.73%
	3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
	4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perhubungan								
	5. Program Operasional Prasarana Perhubungan								
3	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Rata-rata kecepatan kendaraan di ruas jalan perkotaan	37 km/ jam	37 km/ jam	100.00%	Rp 424,910,800	Rp 421,457,550	99.19%	99.19%
	6. Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas								
4	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	70%	75%	107.14%	Rp 38,878,685,970	Rp 34,492,627,179	88.72%	82.80%
	7. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi								
	8. Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi								

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Dalam pencapaian target perjanjian kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menyusun program kegiatan sebagai berikut :

a) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan umum mempunyai target 65% dan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.637.550,- dengan realisasi kinerja 61,25% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 349.627.100,-. Sasaran ini didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya terealisasi sebesar 100%;
- b) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan terealisasi sebesar 100%;
- c) Kegiatan Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran terealisasi sebesar 100%; dan
- d) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis tidak terealisasi 100%. Hal ini disebabkan belum mendapat izin dari Kementerian Perhubungan tentang pemanfaatan Bandara khusus Pagerungan.

2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 100%; dan
- b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 100%.

b) Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi

Sasaran meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi mempunyai target 70% dan alokasi anggaran sebesar Rp.

72.943.205.829,- dengan realisasi kinerja 81,50% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.498.244.337,-. Sasaran ini didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini didukung dengan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terealisasi sebesar 100%;
- b) Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terealisasi sebesar 100%;
- c) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan terealisasi sebesar 100%;
- d) Kegiatan Pembangunan Pelabuhan/Terminal/Bandara terealisasi sebesar 100%;
- e) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan/ Terminal/ Bandara hanya terealisasi sebesar 43,68%. Hal ini disebabkan pada sub kegiatan pembebasan lahan berkas belum lengkap dan pemilik lahan berkeberatan dengan harga ganti rugi tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil taksiran (appraisal); dan
- f) Kegiatan Revitalisasi Pelabuhan/Terminal/Bandara tidak terealisasi 100%. Hal ini disebabkan anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur dananya turun ke kas daerah pada bulan Oktober dimana kegiatan ini adalah fisik dan lelang, sehingga dengan waktu hanya 2 bulan tidak mungkin bisa dilaksanakan kegiatan fisiknya.

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perhubungan

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan terealisasi sebesar 100%; dan
- b) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terealisasi sebesar 100%.

3. Program Operasional Prasarana Perhubungan

Program ini didukung dengan 6 (enam kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Pelabuhan /Terminal terealisasi sebesar 100%;
- b) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung Parkir Berlangganan terealisasi sebesar 100%;
- c) Kegiatan Sosialisasi Parkir Berlangganan terealisasi sebesar 100%;
- d) Kegiatan Pembinaan Juru Parkir terealisasi sebesar 100%;
- e) Kegiatan Operasional Petugas Parkir terealisasi sebesar 100%; dan
- f) Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sumenep terealisasi sebesar 100%.

c) Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas

Sasaran meningkatnya kelancaran lalu lintas mempunyai target 37 km/jam dan alokasi anggaran sebesar Rp. 424.910.800,- dengan realisasi kinerja 99,19% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 421.457.550,-. Sasaran ini didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Program ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas terealisasi sebesar 100%;
- b) Kegiatan Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau terealisasi sebesar 100%;
- c) Kegiatan Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan terealisasi sebesar 100%; dan
- d) Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) terealisasi sebesar 100%.

d) Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas

Sasaran meningkatnya keselamatan lalu lintas mempunyai target 70%

dan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.878.685.970,- dengan realisasi kinerja 75% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.492.627.179,-. Sasaran ini didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Pemeliharaan *Traffic Light* terealisasi sebesar 100%; dan
- b) Kegiatan Pengadaan Alat/Sarana Keselamatan Transportasi terealisasi sebesar 100%.

2. Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi

Program ini didukung dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) terealisasi hanya terealisasi 83,33%. Hal ini disebabkan tidak cukup waktu untuk proses pelaksanaan pengadaan dan pemasangan PJU hasil PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) karena dari sisa waktu yang ada sekitar 77 hari kalender sedangkan untuk proses pengadaan dan pemasangan PJU 93 hari kalender;
- b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) terealisasi sebesar 100%;
- c) Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Penumpang terealisasi sebesar 100%;
- d) Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) terealisasi sebesar 66,67%. Hal ini disebabkan penyelenggaraan penilaian WTN tahap 3 (tiga) akan dilaksanakan tahun 2019; dan
- e) Kegiatan Penyiapan Dokumen Lingkungan Transportasi terealisasi sebesar 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran utama Dinas Perhubungan tidak terlepas dari dukungan dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sumenep untuk bidang perhubungan. Adapun realisasi anggaran per program/ kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep 2018

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,899,000	4,880,200	99.62%
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	20,260,129,000	19,489,182,326	96.19%
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	14,000,000	6,915,500	49.40%
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	206,725,000	204,377,046	98.86%
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	63,180,000	52,570,922	83.21%
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,903,000	36,889,500	99.96%
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	183,605,000	175,852,750	95.78%
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	13,759,000	13,725,500	99.76%
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,000,000	20,290,000	84.54%
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	45,000,000	43,293,000	96.21%
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	150,300,000	149,830,067	99.69%
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam	35,144,000	34,812,000	99.06%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Komputer	16,850,200	12,265,500	72.79%
	2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	109,450,000	109,351,000	99.91%
	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /	130,191,000	119,587,429	91.86%
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	22,977,000	22,477,000	97.82%
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	12,828,600	12,814,100	99.89%
	6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	45,427,000	45,412,000	99.97%
	7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio dan	12,000,000	8,915,000	74.29%
	8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman, Pagar, dan	117,384,000	72,584,565	61.84%
	9 Sewa Tanah / Gedung	14,668,000	11,338,047	77.30%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	25,254,000	15,564,000	61.63%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	25,858,000	25,807,000	99.80%
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	62,083,000	61,722,497	99.42%
	3 Penyusunan Penetapan Kinerja	10,520,000	10,450,000	99.33%
	4 Penyusunan RKA dan DPA	27,181,000	26,667,500	98.11%
5. Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar	1 Peringatan Hari Perhubungan Nasional	38,569,000	38,516,500	99.86%
6. Program Peningkatan Informasi Pembangunan	1 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	25,645,000	19,390,000	75.61%
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	65,194,200	63,771,200	97.82%
	2 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak	38,674,275	37,959,200	98.15%
	3 Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan	176,626,500	173,984,000	98.50%
	4 Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis	65,068,800	1,935,000	2.97%
8. Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas	36,890,800	36,774,750	99.69%
	2 Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi	256,000,000	254,810,000	99.54%
	3 Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas	82,020,000	80,650,000	98.33%
	4 Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	50,000,000	49,222,800	98.45%
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	16,000,000	15,329,000	95.81%
	2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	64,073,775	56,648,700	88.41%

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep 2018 (Lanjutan)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Perencanaan Pembangunan Prasaranan dan	100,000,000	96,823,500	96.82%
	2 Koordinasi dalam Pembangunan Prasaranan dan	30,927,650	30,851,497	99.75%
	3 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan	200,000,000	197,415,500	98.71%
	4 Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara	900,000,000	892,321,650	99.15%
	5 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan/ Terminal/	68,979,990,400	26,520,408,438	38.45%
	6 Revitalisasi Pelabuhan / Terminal / Bandara	1,000,000,000	43,500,000	4.35%
11. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	490,066,104	486,814,500	99.34%
	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	10,000,175	9,965,400	99.65%
12. Program Operasional Prasarana Perhubungan	1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Pelabuhan/ Terminal	50,000,000	48,495,602	96.99%
	2 Pengadaan Sarana Pendukung Parkir Berlangganan	237,788,400	232,812,700	97.91%
	3 Sosialisasi Parkir Berlangganan	25,000,000	23,593,000	94.37%
	4 Pembinaan Juru Parkir	74,337,925	72,884,900	98.05%
	5 Operasional Petugas Parkir	785,200,000	782,692,750	99.68%
	6 Pengendali dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum	59,895,175	59,664,900	99.62%
13. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	1 Pemeliharaan <i>Traffic Light</i>	105,567,470	105,562,450	100.00%
	2 Pengadaan Alat / Sarana Keselamatan Transportasi	50,000,000	45,200,000	90.40%
14. Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi	1 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan	11,707,375,000	7,362,154,614	62.88%
	2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan	653,831,000	652,962,587	99.87%
	3 Pengadaan Kapal Motor Penumpang	25,810,672,500	25,806,209,356	99.98%
	4 Penyelenggaraan Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	40,000,000	37,113,004	92.78%
	5 Penyusunan Dokumen Lingkungan Transportasi	511,240,000	483,425,168	94.56%
TOTAL		134,406,969,952	85,607,437,119	63.69%

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 134.406.969.949,- dengan realisasi Rp 85.607.437.115,-. Sedangkan rata-rata capaian kinerjanya **92,49%** dengan serapan anggaran rata-rata kegiatan sebesar **89,03%**. Namun bila dibandingkan antara jumlah total anggaran dan serapan anggaran total hanya mencapai **63,69%**.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep memiliki sasaran tambahan sebagai dinas penghasil yaitu pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian indikator kinerja rata-rata **75,19%** atau termasuk kategori “**sedang**”, dengan rincian sebagaimana Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep 2017

NO.	URAIAN RINCIAN OBJEK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
A	Retribusi Jasa Umum	4.252.234.250	3.189.983.100	75,02
1	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	586.264.250	493.212.600	84,13
2	Ret. Pelayanan Parkir	3.665.970.000	2.696.770.500	73,56
B	Retribusi Jasa Usaha	227.285.300	180.470.655	79,40
1	Ret. JUP Kekayaan Daerah	5.045.700	-	0,00
2	Ret. Terminal	25.000.000	10.862.000	43,45
3	Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	152.239.600	134.175.255	88,13
4	Ret. Sewa Toko / Kantin / Kios	45.000.000	35.433.400,	78,74
C	Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000	710.000	17,75
1	Ret. Izin Trayek	4.000.000	710.000	17,75
	JUMLAH	4.483.519.550	3.371.163.755	75,19

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada 6 (enam) item yang capaian realisasinya di bawah 100%, hal ini dikarenakan selain penetapan targetnya terlalu tinggi di atas potensi PAD yang ada juga disebabkan adanya pengambilalihan terminal tipe A oleh Kementerian Perhubungan dan adanya alih fungsi terminal tipe C menjadi pasar dan taman kota (Ruang Terbuka Hijau). Capaian dari retribusi tersebut cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tingkat capaian pada tahun 2017. Dimana realisasi pada tahun 2017 mencapai Rp. 3.017.370.910,-.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, serta Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Dalam program kegiatan tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep melaksanakan 1 (satu) sasaran dengan 14 (empat belas) program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan dimana capaian indikator kinerja rata-rata adalah **92,49%** atau termasuk kategori "**BAIK**".

Laporan kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep di dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun anggaran 2016 - 2021. Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



DAFTAR LAMPIRAN

- I. PERJANJIAN KINERJA 2018**
- II. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2018**
- III. PENGUKURAN KINERJA 2018**
- IV. MATRIKS RENSTRA 2016-2021**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1. Persentase korban kecelakaan lalu lintas 1.2. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	0.0764% 83.75%

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,087,644,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	464,925,600	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,254,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	125,642,000	
5	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar	38,569,000	
6	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	25,645,000	
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4,861,623,050	
8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perhubungan	350,066,279	
9	Program Operasional Prasarana Perhubungan	977,221,500	
10	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	463,679,775	
11	Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	374,910,800	
12	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	64,073,775	
13	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	105,567,470	
14	Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi	18,339,824,750	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		45,304,646,999	

Sumenep, Januari 2018



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1. Persentase korban kecelakaan lalu lintas 1.2. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	0.0764% 83.75%

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,087,644,000	21,037,644,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	464,925,600	481,775,800	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,254,000	25,254,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	125,642,000	125,642,000	
5	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar	38,569,000	38,569,000	
6	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	25,645,000	25,645,000	
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4,861,623,050	71,210,918,050	
8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perhubungan	350,066,279	500,066,279	
9	Program Operasional Prasarana Perhubungan	977,221,500	1,232,221,500	
10	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	463,679,775	345,563,775	
11	Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	374,910,800	424,910,800	
12	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	64,073,775	80,073,775	
13	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	105,567,470	155,567,470	
14	Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi	18,339,824,750	38,723,118,500	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		45,304,646,999	134,406,969,949	

Sumenep, November 2018



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMENEP**

Ec. H. SUSTONO, MM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630523 199003 1 007

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

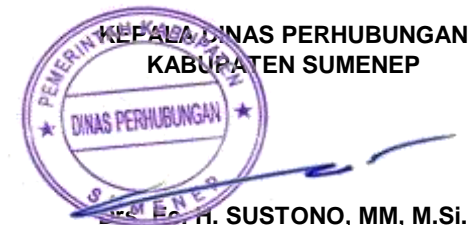
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1. Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0.0764%	0.0921%	82.92%
		2.1. Persentase kecukupan angkutan umum yang lay	83.75%	96.06%	114.70%
CAPAIAN KINERJA					98.81%

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,087,644,000	21,037,644,000	20,232,618,811	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	464,925,600	481,775,800	414,744,641	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,254,000	25,254,000	15,564,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	125,642,000	125,642,000	124,646,997	
5	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar	38,569,000	38,569,000	38,516,500	
6	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	25,645,000	25,645,000	19,390,000	
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4,861,623,050	71,210,918,050	27,781,320,585	Pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Trunojoyo hanya terealisasi 43.68% (109.242 M2 dari 250.111 M2)
8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	350,066,279	500,066,279	496,779,900	
9	Program Operasional Prasarana Perhubungan	977,221,500	1,232,221,500	1,220,143,852	
10	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	463,679,775	345,563,775	277,649,400	
11	Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	374,910,800	424,910,800	421,457,550	
12	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	64,073,775	80,073,775	71,977,700	
13	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	105,567,470	155,567,470	150,762,450	
14	Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan	18,339,824,750	38,723,118,500	34,341,864,729	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		45,304,646,999	134,406,969,949	85,607,437,115	

Sumenep, Januari 2019



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



H. SUSTONO, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

MATRIKS RENSTRA 2016 - 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Dasar 2015	2016			2017			2018			2019	2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Capaian Kinerja thd target Akhir RPJMD
				Target	Real	Capaian	Target	Real	Capaian	Target	Real	Capaian	Target	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tersedianya prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas	1.1. Persentase korban kecelakaan lalu lintas.	0.0794%	0.0784%	0.0780%	100.55%	0.0774%	0.1051%	73.66%	0.0764%	0.0921%	82.92%	0.0754%	0.0744%	0.0734%	69.85%
		1.2. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak.	80.15%	81.35%	88.86%	109.23%	82.55%	88.293%	106.96%	83.75%	96.06%	114.70%	84.95%	86.15%	87.35%	101.08%
Total Capaian Kinerja						104.89%			90.31%			98.81%				

Sumenep, Januari 2019



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMENEP**

Dr. H. SUSTONO, MM, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19630523 199003 1 007